

RINGKASAN

Fitria Suryaningsih, 2019, Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si., Eko Yudianto Y., S. Sos., M. AP, 158 hal + xviii

Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam RJPMN. Program KOTAKU adalah salah satu program pemerintah pusat untuk mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019. Pemerintah juga berupaya agar dengan disalurkannya program KOTAKU ini diharapkan dapat memberikan hunian yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat dikawasan permukiman kumuh. Kota Probolinggo juga salah satu kota yang mengimplementasikan program KOTAKU sejak tahun 2016 dengan jumlah kawasan permukiman kumuh sekitar \pm 173 Ha. Kecamatan Mayangan memiliki kawasan permukiman sedang dan ringan namun jika dibiarkan akan membuat kawasan permukiman dengan tingkat kekumuhan tinggi sehingga tak heran bila kecamatan mayangan termasuk dalam prioritas 2 dan 3 serta termasuk dalam flag 2. Sesuai dengan SDGs terdapat 2 dari 17 tujuan TPB/SDGs yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan Program KOTAKU, yaitu terdapat pada indikator ke-6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi secara Berkelanjutan, dan indikator ke-11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana implementasi serta faktor pendukung dan penghambat Program KOTAKU dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program KOTAKU di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berjalan cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari enam indikator pengukuran implementasi kebijakan melalui model pendekatan *top-down* yaitu ukuran dan tujuan kebijakan sudah ideal dengan *sosio-kulture* masyarakat Kecamatan Mayangan; Sumber kebijakan di dukung oleh SDM yang kompeten, sumber daya finansial yang baik dan lancar, dan sumber daya waktu yang tepat; karakteristik badan pelaksana yang berkompeten dan memiliki spesialisasi di bidang masing-masing; sikap para pelaksana yang mendukung implementasi ini; lingkungan perekonomian yang mendukung, dari segi lingkungan politik tidak ada pengaruh dari kelompok politik dan segi lingkungan sosial masih ada masyarakat yang tidak siap diintervensi. Akan tetapi dilihat dari indikator komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, ini lah yang membuat implementasi program KOTAKU di kecamatan Mayangan tidak berjalan efektif, karena masih kurangnya koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terlibat sehingga menyebabkan beberapa kali terjadi tumpang tindih kebijakan. Faktor pendukung dari implementasi program KOTAKU adalah semua pihak dalam program KOTAKU terlibat secara produktif dan saling bekerjasama dengan baik; serta sumber daya manusia yang memiliki komitmen untuk memberdayakan masyarakat dan tim pelaksana ahli yang

memiliki spesialisasi dibidangnya masing-masing. Sedangkan faktor penghambat yakni terdapat dua hambatan dari segi *internal* dan *eksternal*. Hambatan segi *internal* yakni masih kurangnya koordinasi dan pergantian staf dalam tim pelaksana. Sedangkan hambatan *external* adalah kelompok sasaran itu sendiri.

Dalam implementasi program KOTAKU hanya 4 kelurahan yang memperoleh dana BDI tahun 2018 sebesar 1M untuk tiap-tiap BKM, namun yang terealisasi untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar 99,5%. Sehingga dengan begitu dapat dilihat pula bahwa dukungan yang diberikan program KOTAKU dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terletak pada indikator ke-6, dukungan dari Program KOTAKU berupa pembangunan septitank komunal; sedangkan dukungan pada indikator ke-11 berupa pengurangan luas kawasan kumuh perkotaan, pembangunan atau rehabilitasi jalan (jalan paving blok dan jalan rabat beton), pembangunan atau rehabilitasi saluran drainase permukiman (saluran terbuka; saluran tertutup; gorong-gorong), pembangunan atau rehabilitasi sarana persampahan (gerobak/motor pengangkut sampah).

Kata kunci: Implementasi, Program KOTAKU, SDG's, TPB.

SUMMARY

Fitria Suryaningsih, 2019, Implementation of a No Slum City Program (KOTAKU) in Order to Achieve Sustainable Development Goals (Study in Mayangan District, Probolinggo City), Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Sc., Eko Yudianto Y., S. Sos., M. AP, 158 things + xviii

Indonesia has supported the Sustainable Development Goals with a strong commitment and take initial action, including connecting most SDGs targets and indicators into the RJP MN. The KOTAKU program is one of the central government's programs to realize the 2015-2019 RPJMN target. The government is also working so that the distribution of the KOTAKU program is expected to provide adequate housing for the community, especially for communities in the slum areas. The city of Probolinggo is also one of the cities that implemented the KOTAKU program since 2016 with a number of slum areas around \pm 173 Ha. Mayangan Subdistrict has a medium and light residential area but if left unchecked it will make a residential area with a high slum level so it is not surprising that the sub-district is included in priorities 2 and 3 and is included in flag 2. In accordance with the SDGs there are 2 out of 17 TPB / SDGs directly related to the activities of the KOTAKU Program, which is found in the 6th indicator of Guaranteeing the Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation, and the 11th indicator of Making Cities and Population Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable.

The purpose of this study is to describe and find out how the implementation and supporting factors and inhibitors of the KOTAKU Program in order to achieve the Sustainable Development Goals in Mayangan Sub-District, Probolinggo City.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection in this study uses data collection methods of observation, interviews and documentation. Data collection is done by purposive and snowball.

The results of this study indicate that the implementation of the KOTAKU program in Mayangan District, Probolinggo City runs quite effectively. This can be seen from the six indicators measuring policy implementation through a top-down approach model, namely the size and objectives of the policies that are ideal with the socio-culture of the Mayangan District community; The source of the policy is supported by competent human resources, good and smooth financial resources, and the right time resources; characteristics of competent implementing agencies and specialization in their respective fields; the attitude of the implementers who support this implementation; economic environment that supports, in terms of the political environment there is no influence from political groups and in terms of the social environment there are still people who are not ready to be intervened. However, seen from the indicators of communication between organizations and implementing activities, this is what makes the implementation of the KOTAKU program in Mayangan sub-district not effective, because there is still a lack of coordination with the agencies or institutions involved, causing several policy overlaps. Supporting factors from the implementation of the KOTAKU program are all parties in the KOTAKU program involved productively and cooperating well with each other; and human resources who are committed to empowering the community and the implementing team of experts who specialize in their respective fields. While the inhibiting factors are two internal and external obstacles. Internal barriers are still

lack of coordination and staff change in the implementation team. Whereas the external obstacle is the target group itself.

In the implementation of the KOTAKU program only 4 villages received BDM funds in 2018 amounting to 1M for each BKM, but those that were rehabilitated for infrastructure development were only 99.5%. So that it can be seen that the support provided by the KOTAKU program in achieving sustainable development goals lies in the 6th indicator, support from the KOTAKU Program in the form of communal septic development; while support for the 11th indicator is in the form of reducing the area of urban slums, building or rehabilitating roads (paving blocks and concrete rebate roads), building or rehabilitating residential drainage channels (open channels; closed canals; culverts), construction or rehabilitation of facilities solid waste (wagon / motorbike transporting garbage).

Keywords: Implementation, KOTAKU Program, SDG's, TPB.